



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 27 Juli 2021

Halaman: 4

Mobilitas Boleh Kuning, Tetapi Kasus Tinggi Masih Jadi Warning

Pemda DIY mengklaim mobilitas di kabupaten dan kota di DIY sudah masuk zona kuning semua atau persentase penurunan mobilitas sudah di atas 20% selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV atau perpanjangan PPKM Darurat ini.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan PPKM level IV tetap diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Warung makan diperbolehkan buka dengan waktu makan untuk setiap pengunjung selama 20 menit.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad, meski mobilitas turun atau sudah zona kuning, tetapi nyatanya pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan masih banyak ditemukan. Selama perpanjangan PPKM Darurat dari 21-25 Juli, Satpol PP DIY menemukan ada 149 pelanggaran pelaku usaha. Jumlah pelanggaran tersebut didominasi oleh warung, toko, dan kafe melanggar Instruksi Gubernur maupun Surat Edaran Gubernur selama PPKM Level 4.

Di sisi lain Kepala Bidang Humas, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol (UHP) Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji mengatakan terjadi penambahan kasus positif Covid-19 per 24 Juli 2021 sebanyak 1.628 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 102.633 kasus. Kasus ini melonjak pada Sabtu 25 Juli 2021 sebanyak 2.145 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi sejak pandemi Covid-19 melanda DIY pada Maret 2020 lalu sampai saat ini menjadi 104.778 kasus.

Betapa pun, lonjakan kasus itu yang harus jadi perhatian. Bukan hanya soal penurunan mobilitasnya, lonjakan kasus itulah yang sejatinya jadi persoalan.

Jangan sampai gelombang mobilitas turun lantas malah memicu lonjakan kasus. Bagaimana pun lonjakan kasus harus ditekan dengan cara mengerem mobilitas. Jangan lengah, gunakan upaya semaksimal mungkin termasuk menekan dampak terpukulnya perekonomian warga akibat PPKM yang tampaknya harus terus diperpanjang ini.

Pelonggaran makan di warung yang diumumkan Presiden pun jangan malah memicu lonjakan kasus. Warga dan pemilik warung harus sadar risiko.

Setidaknya, ada dua hal penting yang menjadi poin dalam penurunan kasus. *Pertama* adalah ketegasan pemerintah dalam menerapkan aturan yang sudah dibuat. PPKM Darurat tidak berjalan sesuai rencana karena pemerintah daerah belum berani memaksa warga tinggal di rumah masing-masing.

Kedua, masyarakat juga jangan ada lagi yang resisten terhadap aturan untuk stay di rumah. Padahal kunci utama untuk menurunkan kasus adalah pengurangan aktivitas masyarakat di luar rumah.

Selain itu, selama masa pelonggaran, vaksinasi massal Covid-19 juga jangan sampai ikut dilonggarkan. Bagaimanapun, vaksinasi diperlukan untuk meminimalkan dampak yang lebih fatal akibat Covid-19.

Upaya mencapai target 20.000 vaksinasi per hari harus terus dilakukan. Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah, salah satunya adalah bersinergi dengan pihak ketiga sehingga pelaksanaan vaksinasi pun bisa lebih optimal.

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. BPBD			
4. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005